



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: <b>III (tiga).</b>
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: <b>1. Dewan Pendidikan 2. Kepala Sekolah 3. Komite Sekolah 4. Pendidik dan Tenaga pendidik 5. Peserta Didik</b>
Hari/Tanggal	: <b>Selasa, 07 April 2020</b>
Pukul	: <b>10.00 – Selesai</b>
Tempat	: Virtual
Pimpinan Rapat	: <b>Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M./wakil Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP,MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>1. Permasalahan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (belajar dari rumah). 2. Masukan dan Pandangan terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam kondisi Pandemi Corona Virus Deseases 19 (Covid 19). 3. Lain-lain.</b>
Hadir Komisi X DPR RI	: 34 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: <b>1. Bpk. Idris Affandi, S.Pd., M.Pd. - Dewan Pendidikan Jawa Barat 2. Ibu. Prof. Itje Chodidjah - Dewan Pendidikan DKI Jakarta 3. Bpk. Prof. Dr. Wan Syaifuddin, M.A. - Dewan Pendidikan Sumatera Utara 4. Romo TB. Gandhi Hartono, S.J. - Sekretaris Eksekutif Komisi Pendidikan KWI 5. Bpk.Wisnugroho Suronto, S.Pd., M.M. - Kepala Sekolah SMPN 5 Balikpapan Kalimantan Timur 6. Ibu. Dra. Mimiek - Kepala Sekolah SMAN 1 Slawi Jawa Tengah 7. Bpk. Mujahidin, M.Pd. - Kepala Sekolah SMK Al Madani Brebes Jawa Tengah 8. M. Yahya, M.Kom - Pendidik SMKN 1 Samarinda</b>

9. Bpk. Drs. H. Rofiudin - Komite Sekolah SMP Ikhsaniyah Kota Tegal
10. Ibu. Yeni Handayani - Komite Sekolah SDN 03 Tenggarong Kukar Kalimantan Timur
11. Raychan Zalza Ansharullah (Ketua Osis) SMAN 1 Slawi Jawa Tengah
12. M. Hafiz Nur Faozan (Ketua MPK) SMAN 1 Slawi Jawa Tengah.

## I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.10 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Pendidik (Tendik) dan Peserta Didik serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

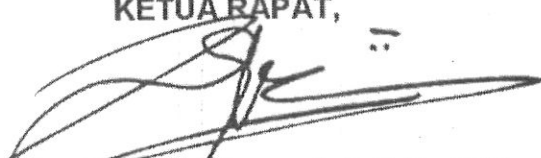
1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Pendidik dan Tendik dan Peserta Didik yang telah menyampaikan aspirasi dan masukannya mengenai permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa penanganan pandemi COVID-19 (*bahan paparan terlampir*)
2. Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah, Pendidik dan Tendik dan Peserta Didik telah menyampaikan aspirasi dan mengusulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu:
  - a. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terkendala dengan belum adanya kesiapan SDM (Guru, Orang Tua, Siswa), belum tersedianya dukungan infrastruktur jaringan listrik, internet stabil dan murah serta terbatasnya alat media belajar seperti laptop, *smartphone* dll.
  - b. Diperlukan modul/juklak pelaksanaan PJJ dan secara aktif melakukan pelatihannya untuk guru SMP dan SMA/SMK, serta panduan belajar interaktif bagi Guru, Orangtua dan Siswa TK dan SD.
  - c. Adanya akses internet gratis untuk web sumber-sumber belajar daring yang telah dikelola dan dikembangkan oleh Kemdikbud RI.
  - d. Memberikan keleluasaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOSDA dan BOP PAUD selama darurat pandemi Covid-19 yang akan digunakan memfasilitasi PJJ.
  - e. Penyelenggara pendidikan swasta diberikan bantuan antara lain berupa insentif melalui BOSDA, BOP PAUD dan BOS bagi pendidik dan tenaga kependidikan selama masa PJJ.

- f. Pemangku jasa provider jaringan seluler agar segera membuka jaringan ke daerah 3T dan daerah yang tidak memiliki akses internet serta memberikan keringanan/membebasakan biaya beban data (kuota) untuk mendukung proses PJJ selama masa penanganan pandemi COVID-19.
  - g. Kebijakan Belajar Di Rumah dengan pendekatan pembelajaran daring selama masa penanganan Covid-19, menjadi langkah awal dalam menata ekosistem pembelajaran daring untuk kebutuhan jangka panjang pendidikan nasional serta perlu segera melakukan langkah yang konkrit.
  - h. Dalam masa PJJ pendidikan kecakapan hidup dan pembentukan karakter supaya masuk menjadi bagian dari penugasan kepada siswa.
  - i. Materi PJJ harus menekankan informasi edukasi kepada siswa terkait pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.
3. Pandangan dan masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan (Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Pendidik dan Tendik dan Peserta Didik) menjadi bahan pertimbangan Komisi X DPR RI serta akan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat dengan Pemerintah khususnya dengan Kemendikbud RI, dalam merumuskan kebijakan pendidikan di tengah darurat pandemi Covid-19.
  4. Komisi X DPR RI akan mengadakan rapat gabungan dengan komisi yang membidangi layanan penyiaran publik dan telekomunikasi serta mengundang perusahaan jasa provider jaringan seluler untuk membahas akses internet dan keringanan beban data (kuota) dalam upaya mendukung proses pembelajaran jarak jauh selama masa penanganan pandemi Covid-19.
  5. Komisi X DPR RI mengharapkan para pemangku kepentingan pendidikan yang hadir dalam RDPU hari ini (Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Pendidik dan Tendik) untuk memberikan masukan lainnya secara tertulis terutama terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud RI, dan disampaikan kepada Komisi X DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.00 WIB

**KETUA RAPAT,**

  
Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.